

▶ JALAN TOL

Kenaikan Tarif Diimbangi SPM

JAKARTA—Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan tarif jalan tol harus diimbangi dengan peningkatan mutu jalan agar pengguna tidak merasa dirugikan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan perusahaan jalan tol harus menganut sifat efisiensi dalam menetapkan kenaikan tarif.

"Harus dihitung juga indeks efisiensi, berapa keuntungan yang wajar untuk dikelola oleh badan usaha," katanya dalam diskusi pakar *Skema Investasi Industri Jalan Tol*, Selasa (10/9).

Menurutnya, selama ini penetapan tarif oleh perusahaan jalan tol berorientasi bisnis dan berbeda dengan infrastruktur lainnya, meskipun tidak dipungkiri kriteria bisnis jalan bebas hambatan ini berbeda dengan lainnya.

Apalagi, lanjutnya, 2 tahun sekali, setiap jalan tol mendapatkan haknya untuk menaikkan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan.

Namun, ujar Sudaryatmo, bagi konsumen kenaikan tarif harus mengacu pada dua hal. *Pertama*, kemampuan konsumen dalam membayar dan *kedua*, mutu pelayanan yang terjamin.

"Konsumen tidak keberatan dengan kenaikan tarif tol, akan tetapi kenaikan tersebut harus sesuai dengan batas kemampuan konsumen untuk membayar," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman menyampaikan kenaikan tarif harus dilakukan, karena penetapan tarif awal yang tertuang dalam perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT) cenderung rendah.

"Kalau tidak murah tidak laku, sedangkan investasi jalan tol itu sangat besar. Tercatat paling kecil Rp3 triliun untuk 7 km," jelasnya.

Mengingat nilainya yang besar tersebut, menurutnya, alokasi risiko investasi antara swasta dan pemerintah harus dibagi proporsional. (*Andhika Prawira/Dimas Novita S.*)